

### Bab XXIII Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi satu pemerintahan provinsi, dua pemerintahan kota dan 11 pemerintahan kabupaten. Selain itu, di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 25 BUMD, terdiri dari satu BPD Provinsi Kalimantan Selatan, 11 RSUD, 10 PDAM, dan tiga PD.

Dalam Semester I TA 2007, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2006 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas bantuan keuangan parpol pada 12 entitas provinsi/kota/kabupaten dan pemeriksaan atas dana bantuan Asian Development Bank (ADB) Tahun 2006 satu entitas.

#### Hasil Pemeriksaan APBD

##### 1. Pemeriksaan Keuangan

Hasil pemeriksaan LKPD TA 2006 pada 12 entitas memuat opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) untuk sembilan entitas, “Tidak Wajar” (TW) untuk dua entitas, dan “Disclaimer” untuk satu entitas, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp5,18 triliun, belanja sebesar Rp4,45 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp850,25 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp431,85 miliar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagaimana dimuat dalam tabel berikut.

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas Yang Diperiksa	Realisasi Anggaran				Opini
		Pendapatan	Belanja	Pembiayaan		
				Penerimaan	Pengeluaran	
1.	Prov. Kalsel	1.179.994,17	1.129.751,17	195.626,45	44.217,15	WDP
2.	Kab. Barito Kuala	329.482,20	278.952,82	23.372,25	4.885,92	TW
3.	Kota Banjarmasin	490.672,51	384.551,32	85.528,22	27.122,55	WDP
4.	Kab. Banjar	467.248,68	408.212,92	43.146,69	6.500,00	WDP
5.	Kab. HSS	348.136,83	301.069,88	49.224,75	96.291,70	WDP
6.	Kab. Tapin	327.652,35	293.662,96	65.530,76	3.965,21	WDP
7.	Kota Banjarbaru	269.185,39	225.952,36	23.149,99	2.500,00	WDP
8.	Kab. Tanah Laut	415.938,14	298.316,12	101.171,38	218.793,40	TW
9.	Kab. Balangan	273.739,82	221.331,06	61.445,56	1.600,00	Disclaimer
10.	Kab. HST	340.165,67	306.202,85	98.718,36	7.500,00	WDP
11.	Kab. HSU	327.637,31	252.736,64	19.474,75	5.258,00	WDP
12.	Kab. Tabalong	418.449,57	348.401,00	83.862,99	13.217,45	WDP
Jumlah		5.188.302,64	4.449.141,10	850.252,15	431.851,38	-

Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan belum sepenuhnya dipatuhi, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan yang berikut.

#### **Provinsi Kalimantan Selatan**

**1.1** Realisasi bagi hasil bukan pajak sebesar Rp115,04 miliar belum termasuk potongan atas kesalahan transfer royalti batu bara sebesar Rp12,00 miliar.

**1.2** Terdapat dana belum disetor ke kas daerah sebesar Rp2,32 miliar, yang terdiri atas Dana Perimbangan dari Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2006 sebesar Rp1,94 miliar dan UUDP TA 2006 sebesar Rp384,91 juta.

**1.3** Realisasi belanja/pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp6,39 miliar, terdiri atas biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) pada Dispenda sebesar Rp1,17 miliar, bantuan untuk bencana alam penanggulangan banjir di Banjarbaru sebesar Rp1,20 miliar, pengeluaran belanja tidak tersangka sebesar Rp1,40 miliar, belanja bantuan keuangan kepada instansi vertikal sebesar Rp1,12 miliar, dan penunjukkan pengelola dana cadangan daerah dan penempatan dana cadangan daerah untuk pelaksanaan PON tahun 2008 sebesar Rp1,50 miliar.

#### **Kabupaten Barito Kuala**

**1.4** Pengelolaan dana yang berasal dari pinjaman senilai Rp4.485,500 juta dilakukan diluar mekanisme APBD dan diantaranya sebesar Rp533,00 juta masuk ke rekening pribadi

#### **Kota Banjarmasin**

**1.5** Surat Pertanggungjawaban Bendaharawan Sekretariat DPRD senilai Rp4,08 miliar belum diverifikasi, termasuk diantaranya lima kegiatan senilai Rp589,89 juta belum dipertanggungjawabkan oleh pemimpin kegiatan.

#### **Kabupaten Banjar**

**1.6** Realisasi belanja tidak tersangka sebesar Rp1,46 miliar tidak sesuai ketentuan.

#### **Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

**1.7** Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan pada Setda sebesar Rp1,25 miliar tidak sesuai ketentuan.

**Kabupaten Tapin**

**1.8** Realisasi biaya insentif/upah pungut PAD pada Dinas Pendapatan sebesar Rp335,25 juta dan penerimaan komersialisasi jalan perusahaan pada Setda sebesar Rp5,66 miliar tidak sesuai ketentuan.

**1.9** Anggaran biaya jasa kantor lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp288,75 juta direalisasikan dalam bentuk bantuan yang diberikan secara tunai kepada pejabat di satker Pemda Tapin.

**1.10** UUDP Setda Kabupaten Tapin TA 2006 sebesar Rp2,46 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**1.11** Realisasi belanja bantuan sosial pada Setda sebesar Rp21,45 miliar tidak efisien, ekonomis dan efektif.

**Kota Banjarbaru**

**1.12** Pengeluaran Kas Daerah mendahului penetapan APBD TA 2006 sebesar Rp2,04 miliar.

**1.13** Realisasi belanja pada Pos Setda Kota Banjarbaru sebesar Rp33,88 miliar termasuk di dalamnya bantuan ABRI Manunggal Desa (AMD) sebesar Rp320,80 juta dan untuk Instansi Vertikal lainnya sebesar Rp158,40 juta.

**Kabupaten Tanah Laut**

**1.14** Penggunaan dana bantuan untuk pembangunan Mesjid Syuhada Pelaihari tidak didukung bukti lengkap sebesar Rp3,41 miliar.

**1.15** Realisasi belanja pada APBD TA 2006 tidak dilengkapi bukti pendukung yang memadai sebesar Rp5,96 miliar.

**1.16** Pembayaran biaya transpor bandara belum ditetapkan dalam standar serta pembayaran ganda atas uang harian merugikan keuangan daerah sebesar Rp381,72 juta.

**Kabupaten Balangan**

**1.17** Upaya penggelapan penerimaan daerah dari PPJU oleh Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah merugikan keuangan daerah sebesar Rp265,35 juta.

**Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

**1.18** Bantuan keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan secara rutin dan terus-menerus merupakan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp851,32 juta.

**Kabupaten Hulu Sungai Utara**

**1.19** Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan oleh 32 SD/MI tidak didukung dengan bukti yang memadai senilai Rp692,00 juta.

**1.20** Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp2,06 miliar.

**Kabupaten Tabalong**

**1.21** Sisa dana bencana alam yang belum direalisasikan sampai dengan akhir TA 2006 belum tercatat sebagai pendapatan daerah sebesar Rp5,00 miliar.

**2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu TA 2006 mencakup pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik pada 12 entitas, dan pemeriksaan atas dana bantuan ADB pada satu entitas serta belanja daerah pada satu entitas, dengan nilai anggaran sebesar Rp363,53 miliar, realisasi anggaran sebesar Rp363,53 miliar, dan nilai cakupan pemeriksaan sebesar Rp211,86 miliar.

**Belanja Daerah****Kabupaten Hulu Sungai Utara**

**2.1** Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah senilai Rp 1,26 miliar tidak sesuai peruntukan.

**2.2** Proses Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Balai Benih Ikan senilai Rp1,00 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.